

IBNU TAIMIYAH'S CONTRIBUTION TO POLITICAL STRATEGY IN INDONESIA

Adha Annisa Febriyanti¹, Nurhikmah², Dhea Ananda Hasyim³, Kurniati⁴

¹Faculty of Sharia and Law, Alauddin State Islamic University of Makassar, Indonesia
¹adhaannisa612@gmail.com

²Faculty of Sharia and Law, Alauddin State Islamic University of Makassar, Indonesia
²nurhikmahhh017@gmail.com

³Faculty of Sharia and Law, Alauddin State Islamic University of Makassar, Indonesia
³hasyimdhea1221@gmail.com

⁴Faculty of Sharia and Law, Alauddin State Islamic University of Makassar, Indonesia
⁴Kurniati@uin-alauddin.ac.id

Abstract

The characteristics of Islamic politics are always related to moral or moral goals, such as trustworthiness, honesty, truth in words and deeds, and justice. However, the reality is that politics in Indonesia is still coloured by various concerning problems, such as the rise of money politics and identity politics, which deviate from the political ethics taught by Ibn Taimiyah. This research aims to identify strategies taught by Ibn Taimiyah that are still relevant in overcoming current political conditions. The research method used is a literature study with a qualitative approach. The strategies that are considered still relevant according to Ibn Taimiyah's views to deal with contemporary problems include upholding the principles of tawhid and justice, the application of sharia in politics, law enforcement and sanctions, da'wah and political education, and the active role of society and leaders.

Keywords: *Ethics, Political Islam, Ibnu Taimiyah*

Abstrak

Karakteristik politik Islam selalu terkait dengan tujuan moral atau akhlak, seperti sikap amanah, kejujuran, kebenaran dalam perkataan dan perbuatan, serta keadilan. Namun, realitanya Politik di Indonesia masih diwarnai oleh berbagai masalah yang memprihatinkan, seperti maraknya politik uang dan politik identitas, yang menyimpang dari etika politik yang diajarkan oleh Ibn Taimiyah. Penelitian ini bertujuan untuk mengidentifikasi strategi-strategi yang diajarkan oleh Ibn Taimiyah yang masih relevan dalam mengatasi kondisi politik saat ini. Metode penelitian yang digunakan adalah studi kepustakaan dengan pendekatan kualitatif. Adapun strategi yang dianggap masih relevan menurut pandangan Ibn Taimiyah untuk menangani permasalahan kontemporer meliputi penegakan prinsip tauhid dan keadilan, penerapan syariah dalam politik, penegakan hukum – hukum dan Hak Allah, dakwah dan edukasi politik, serta peran aktif masyarakat dan pemimpin.

Kata Kunci: *Etika, Politik Islam, Ibnu Taimiyah*

I. Pendahuluan

Etika politik merujuk pada sikap dan tindakan yang diperlihatkan oleh politisi atau warga negara. Politisi yang baik adalah mereka yang bersikap jujur, sopan, memiliki integritas, menghargai orang lain, menerima keberagaman, peduli terhadap kesejahteraan publik, dan tidak mengutamakan kepentingan kelompok mereka sendiri. Oleh karena itu, politisi yang menerapkan etika politik adalah orang-orang yang memiliki moralitas yang tinggi. (Dahlan, 2021)

Moralitas dalam berpolitik sangatlah penting untuk mencapai pemerintahan yang adil, makmur, dan bermoral. Di Indonesia, etika politik berlandaskan Pancasila dan nilai-nilai luhur bangsa, dengan prinsip-prinsip seperti demokrasi, keadilan sosial, dan musyawarah mufakat. Namun, pada masa kini, praktik politik di Indonesia masih diwarnai berbagai masalah yang memprihatinkan, seperti maraknya politik uang, politik identitas, lemahnya penegakan hukum, dan masih banyak lagi.

Sedangkan, karakteristik politik dalam Islam terkait erat dengan tujuan moral atau akhlak, seperti sikap amanah, kejujuran, kebenaran dalam ucapan dan tindakan, serta keadilan. Maka, politik dalam Islam harus didasarkan pada pemahaman yang benar dan selaras dengan prinsip-prinsip agama. (Aly, 2015)

Jika sebuah pemerintah melanggar prinsip-prinsip etika, negara tersebut cenderung mengalami kemunduran. Pemerintah semacam itu gagal melindungi

ISSN:

kedaulatan rakyat, sehingga rakyat menjadi korban. Kegagalan pemerintah dalam mempertahankan persatuan dan kesatuan dapat menyebabkan sikap apatis di antara rakyat.(M. Thahir Maloko, 2013). Oleh karena itu, pemikiran Ibn Taimiyah mengenai etika politik Islam menawarkan strategi-strategi yang digunakan untuk mengatasi tantangan kontemporer yang bertentangan dengan pandangannya.

Menurut Ibnu Taimiyah, membangun pemerintahan yang baik dimulai dengan memilih aktor politik yang tepat. Dengan memilih individu yang berkualitas, kita dapat memperkirakan apakah kebijakan yang dihasilkan akan mementingkan kepentingan bersama atau tidak. Ibnu Taimiyah menekankan pentingnya memiliki standar dalam memilih pemimpin, yang dapat dibandingkan dengan standar yang dimiliki oleh Nabi Muhammad SAW sebagai teladan ideal.(Syaputra, 2011)

Maka memahami secara mendalam tentang etika dalam agama Islam menjadi sangat penting bagi para penganutnya. Keberhasilan seorang politisi dalam menjalankan peran dan tugasnya terletak pada kemampuannya untuk menggabungkan kehidupan berpolitik dengan prinsip-prinsip agama. Agama tidak hanya mengajarkan etika, tetapi juga memungkinkan implementasinya dalam kehidupan sehari-hari. Hubungan yang erat antara ajaran agama dalam kitab suci Islam tentang bagaimana para penganutnya memahami dan menerapkan etika dalam berpolitik menjadi hal yang krusial.(Farhah dan Achmad Farid, 2019)

Para filsuf Muslim menempatkan konsep negara Islam sebagai pusat perhatian dalam upaya menemukan bentuk ideal masyarakat bernegara. Secara umum, terdapat dua pandangan: pertama, pandangan yang menyatakan bahwa Islam dan negara adalah satu kesatuan yang tidak dapat dipisahkan; kedua, pandangan yang menyatakan bahwa Islam dan negara harus dipisahkan. Menurut Muhammad Hari Zamharir, ada tiga model yang menjelaskan hubungan antara agama dan negara. Pertama, model sekuler, di mana legitimasi kekuasaan tidak lagi didasarkan pada etika politik negara modern. Kedua, model komplementer, yang menunjukkan adanya hubungan saling terkait antara agama dan negara. Ketiga, model integralistik, di mana negara dianggap sebagai alat untuk mencapai tujuan-tujuan agama.(Nurhakim, 2017)

Pembahasan politik negara, terutama dari sudut pandang keagamaan seperti Islam, selalu menarik perhatian dan sering kali kontroversial sepanjang sejarah

kehidupan berbangsa dan bernegara. Ketertarikan ini semakin meningkat ketika dikaitkan dengan pembahasan tentang hukum Islam. (Kurniati, 2013) Menurut pandangan Ibnu Taimiyah mengenai etika politik Islam memiliki relevansi yang sangat penting untuk diteliti, mengingat dia adalah salah satu pemikir Islam yang paling berpengaruh dengan ide-ide yang masih relevan hingga saat ini. Ibnu Taimiyah memberikan pandangan yang mendalam tentang hubungan antara agama dan politik, khususnya dalam konteks etika berpolitik.

Dalam era di mana banyak politikus tidak lagi menjunjung tinggi prinsip-prinsip etika politik Islam, dan seringkali membuat keputusan demi kepentingan pribadi atau terlibat dalam korupsi, penelitian ini bertujuan untuk memberikan dorongan kepada masyarakat, baik yang terlibat dalam pemerintahan maupun tidak, agar kembali menerapkan prinsip-prinsip yang diajarkan oleh para pemikir Islam. Hal ini diharapkan dapat membantu menciptakan tata pemerintahan yang baik dan menjaga integritas dalam pelaksanaan tugas publik.

Banyak penelitian sebelumnya telah mengulas pandangan Ibn Taimiyah mengenai etika politik Islam, tetapi hanya sedikit yang secara khusus membahas strategi yang digunakan untuk mengatasi tantangan terkini terkait etika dalam berpolitik. Oleh karena itu, dalam penelitian ini, penulis mengemukakan solusi terhadap permasalahan kontemporer yang bertentangan dengan pandangan Ibn Taimiyah dalam konteks etika politik.

Metode penelitian ini menggunakan penelitian kepustakaan (library research) yang berfokus pada analisis teks dan literatur mengenai pandangan Ibnu Taimiyah terhadap etika politik Islam. Sumber data utama adalah berbagai referensi dan dokumen yang relevan dengan topik penelitian. Teknik pengumpulan data melibatkan pencarian, seleksi, dan analisis terhadap literatur yang sesuai dengan tujuan penelitian. Data dianalisis menggunakan pendekatan kualitatif untuk memahami pandangan Ibnu Taimiyah secara komprehensif dan kontekstual dalam kaitannya dengan etika politik Islam, dengan teknik deskriptif untuk mendukung temuan dan interpretasi penelitian.

II. Pembahasan

A. Pandangan Ibnu Taimiyah Terkait Agama dan Politik

Sepintas tentang biografi Ibnu Taimiyah, ia lahir pada tanggal 10 Rabiul Awal tahun 611 H (22 Januari 1263 M) di kota Harran, Suriah, yang terletak di tenggara negeri Syam (Syaiikh Ahmad Farid, 2006:12). Nama lengkapnya adalah Ahmad Taqiyuddin Abu Abbas bin Syihabuddin 'Abdu Al-Halim bin Syeikh Majd Al-Din Abi Al-Barakat 'Al-Khadar bin 'Ali bin Abdillah. (Stocks, 2016)

Ibnu Taimiyah lahir dalam keluarga yang dikenal sebagai cendekiawan dan ilmuwan terkemuka. Ayahnya, Syihabuddin Abu Ahmad, adalah seorang syaikh dan khatib yang juga menjabat sebagai hakim di kotanya. Kakeknya, Syaikh Islam Majduddin Abu al-Barakat, adalah seorang fakih dalam mazhab Hambali, imam, ahli hadits, ahli ushul fiqh, nahwu, serta seorang hafiz. Pamannya, Fakhruddin, juga dikenal sebagai cendekiawan dan penulis Muslim yang terkenal. (Jordan, 2013) Ia menghabiskan enam tahun pertama masa kecilnya di Harran. Saat kota Harran diserang oleh bangsa Tartar, seluruh keluarganya pindah ke Syam. Pada usia 25 tahun, ia menggantikan posisi ayahnya sebagai guru dan penceramah di masjid-masjid, dan penyampaiannya sering kali dianggap kontroversial. (Arif *dkk.*, 2022)

Ibnu Taimiyah hidup di tengah-tengah masa yang penuh konflik dan tantangan politik serta agama. Dia menegaskan keberanian dan kesucian keyakinan agama. Ibnu Taimiyah hidup dengan keyakinan yang kokoh akan keagungan dan kemuliaan Islam. Pada masanya, dia menyaksikan perang Salib dan penyerbuan bangsa Tartar, dan dia terlibat dalam perjuangan baik dengan pedang maupun dengan pena. Kehidupannya selalu diwarnai oleh jihad yang berkelanjutan, yang akhirnya membawanya dipenjarakan di Damaskus. Di sanalah dia menghembuskan napas terakhirnya pada tanggal 20 Dzulqaidah tahun 728 H (1328 M). (Mahmuddin, 2015)

Selama hidupnya, Ibnu Taimiyah sering kali mengemukakan ide yang berseberangan dengan pendapat para penguasa atau mayoritas masyarakat. Dia dikenal sebagai pengkritik tajam terhadap khurafat dan bid'ah dalam agama, yang membuatnya dihadapi dengan kebencian oleh banyak ulama dan cendekiawan agama. Karena sikapnya yang teguh, dia sering kali menentang arus dan akibatnya beberapa kali dipenjarakan karena menolak mematuhi perintah penguasa. (Melyani, 2020)

ISSN:

Ibnu Taimiyah aktif sebagai pejuang di jalan Allah SWT dalam menghadapi krisis sosial dan politik pada masanya. Dia berpartisipasi dalam perang melawan Tartar dan perang Syaqab, serta mengunjungi Khalifah al-Mālik an-Naṣīr Muhammad Ibn Qalawun, sultan Mamluk, untuk mengajaknya bergabung dalam perang suci tersebut. Kondisi politik, sosial, dan keagamaan yang mengkhawatirkan mendorong Ibnu Taimiyah untuk melakukan pembaharuan. Dia percaya bahwa semua krisis yang dihadapi umat Islam disebabkan oleh perilaku yang mengabaikan ajaran yang terdapat dalam Al-Qur'an, al-Hadis, dan teladan Salaf as-Salih. (A. Muslimin, 2020)

Konsep negara hukum yang dikonstruksi oleh pemikiran Ibnu Taimiyah adalah menganggap bahwa bekerja secara kolektif dalam mengelola sumber daya alam adalah suatu keniscayaan. Dari konsep ini, ia mengembangkan gagasan tentang pentingnya institusi negara. Ibnu Taimiyah dikenal dengan pandangannya yang sangat mengedepankan peran institusi dalam mengelola masyarakat untuk mencapai tujuan bersama. (Suharti, 2015)

Ibnu Taimiyah mengembangkan metodologi yang menantang praktik-praktik kehidupan dan pemerintahan pada masanya yang dianggap menyimpang dari ajaran Islam. Dengan peran sebagai pengawas terhadap berbagai peristiwa, Ibnu Taimiyah mengajukan teori politik Islam melalui konsep *al-syawkah*. Konsep ini melibatkan pemilihan tokoh-tokoh dari berbagai kalangan dan posisi yang dihormati serta dihormati oleh masyarakat. Dia berharap bahwa mereka dapat mengatasi keterbatasan teori ini dengan mengusulkan model kekhalifahan klasik yang didasarkan pada *ahlu al-ḥalli wa al-'aqdi*. (Kasman Bakry *et al.*, 2021)

Dengan demikian, bagi Ibnu Taymiyyah, menegakkan pemerintahan adalah bagian dari ajaran agama. Pemerintahan seharusnya dibentuk untuk melayani Allah dan mengabdikan kepada-Nya. Pengabdian dan kepemimpinan yang sesuai dengan tuntunan Allah dan Rasul-Nya dianggap sebagai sarana untuk mendekati diri kepada Allah. Oleh karena itu, pemerintahan seharusnya dipandang sebagai alat untuk beribadah kepada Allah, bukan sebagai sarana untuk mencari kekuasaan atau keuntungan materi. Ibnu Taimiyah menegaskan bahwa jika pemerintahan digunakan untuk tujuan terakhir tersebut, maka semua urusan akan menjadi rusak. Dia juga mengutip pendapat yang

menyatakan bahwa enam puluh tahun di bawah pemerintahan seorang pemimpin yang zalim lebih baik daripada satu malam tanpa pemimpin. (Anton Afrizal, 2017)

Ibnu Taimiyah memandang kepemimpinan sebagai sebuah amanat. Menurutnya, seorang pemimpin harus memilih pejabat berdasarkan kualitas terbaik mereka, bukan karena hubungan pribadi, uang, atau status sosial. Bahkan, seseorang yang meminta jabatan sebenarnya tidak layak untuk diangkat sebagai pejabat. Semua ini didasarkan pada amanat dari Allah. Singkatnya, jabatan menurutnya adalah tanggung jawab yang harus dijalankan dengan baik. (Farhah, 2019)

Selain itu, Ibnu Taimiyah juga menyatakan bahwa perintah menunaikan amanat dan berlaku adil adalah dua prinsip utama dalam politiknya. Amanat mencakup kekuasaan (politik) dan harta benda (ekonomi). Seorang pemimpin harus bersifat amanah, menjalankan tugas dengan baik, dan bertanggung jawab baik kepada Tuhan maupun sesama manusia. Dalam politik, amanah berarti menunaikan tanggung jawab dengan jujur, sedangkan dalam ekonomi, berarti mengelola kekayaan negara dengan proporsional dan bertanggung jawab demi kemaslahatan rakyat. (IN'AMUZZAHIDIN, 2016)

B. Sistem Politik di Indonesia

Sistem politik Indonesia mencakup semua aktivitas yang berhubungan dengan kepentingan umum yang berlaku di negara ini, termasuk yang pernah berlaku, yang sedang berlangsung, dan yang telah berlangsung sejak berdirinya negara Indonesia hingga saat ini. Beragam faktor dapat mempengaruhi sistem politik Indonesia, termasuk faktor lingkungan, sosial budaya, dan kondisi ekonomi suatu negara. Pengaruh-pengaruh ini membentuk perilaku politik dalam masyarakat dan negara, baik bagi mereka yang memegang kekuasaan maupun mereka yang berada dalam pengaruh dan kendali kekuasaan tersebut. (Anggara, 2015)

Seperti halnya Pada tahun 2014, saat Pemilihan Legislatif di berbagai daerah Indonesia, termasuk di Medan, terjadi masalah politik uang yang melampaui praktik sebelumnya. Para calon di Medan secara signifikan membagikan uang tunai dan barang kepada pemilih serta calo (broker) dalam jumlah yang belum pernah terjadi sebelumnya. Namun, terdapat perbedaan dalam pola politik uang antara Medan dan daerah lain di Sumatera Utara, di mana politik uang sering kali terkait dengan politik identitas. Hal ini

ISSN:

menyediakan mekanisme atau jaringan untuk distribusi patronase, dengan para kandidat menggunakan identitas untuk meningkatkan efektivitas politik patronase mereka. (Aspinall dan Sukmajati, 2015)

Munculnya politik identitas dalam setiap kontestasi politik menunjukkan bahwa transformasi masyarakat menuju demokrasi belum tercapai dan demokrasi yang ada belum terarah. Saat ini, demokrasi masih bersifat "eksklusif" dan "transaksional", belum mencapai tahap "transformasional". Beberapa faktor yang mendorong politik identitas antara lain adalah keragaman Indonesia, peran media sebagai aktor politik, bisnis konsultan dan buzzer, rendahnya literasi media sosial, rendahnya tingkat pendidikan, rendahnya kesadaran bela negara, serta lemahnya penegakan hukum. (I Putu Sastra Wingarta *et al.*, 2021)

Politik modern sering kali mengalami penyimpangan dari ajaran politik yang ditekankan oleh para filosof Muslim di masa lampau. Mereka menegaskan bahwa politik harus selalu berakar pada nilai-nilai moral dan etika yang kokoh, seperti amanah, kejujuran, kebenaran, dan keadilan. Pandangan filosof Muslim menekankan pentingnya menjalankan politik dengan integritas sesuai dengan prinsip-prinsip agama, dengan tujuan utama meningkatkan kesejahteraan umat dan mencapai keadilan sosial. Namun, fenomena politik saat ini sering kali terpengaruh oleh dominasi kepentingan pribadi dan kekuasaan, yang kadang mengabaikan nilai-nilai moral dan etika yang esensial ini.

Maka, dalam konteks etika berpolitik, Ibn Taimiyah menawarkan strategi yang komprehensif untuk mengatasi permasalahan yang bertentangan dengan nilai-nilai moral dan spiritual yang masih relevan hingga saat ini. Berikut beberapa dari strateginya

1. Memilih pemimpin berdasarkan kualitas

Ibnu Taimiyah menegaskan bahwa pentingnya memilih pemimpin berdasarkan kualitas yang baik, seperti kejujuran dan kewibawaan, bukan karena faktor-faktor seperti hubungan pribadi, kekayaan, atau status sosial. Baginya, pemimpin harus dipilih berdasarkan kemampuan mereka untuk memimpin dengan adil, memiliki martabat, dan bertanggung jawab terhadap amanah yang dipercayakan oleh masyarakat. (Melyani, 2020)

ISSN:

2. Penegakan Prinsip Tauhid dan Keadilan

Ibnu Taimiyah menekankan pentingnya tauhid ibadah, yaitu pemurnian hati untuk beribadah hanya kepada Allah tanpa sekutu. Ini adalah esensi tauhid yang menekankan eksklusivitas dalam ibadah kepada Allah. Meskipun istilah "tauḥīd" tidak tercantum langsung dalam Al-Quran, konsep ini diajarkan oleh Rasulullah Saw melalui hadis kepada Ahlul Kitab sebagai dasar utama dalam kehidupan beragama. (Azizah, 2021)

Menurut Ibn Taimiyah, nilai yang paling penting untuk dijaga adalah keadilan dan promosi terhadap kebaikan serta mencegah kemungkaran (*amar ma'ruf nahi munkar*). Dalam konteks politik dan pemerintahan, Ibn Taimiyah mengutamakan prinsip keadilan yang universal secara radikal, bahkan di atas segala hal, termasuk keimanan seseorang terhadap agama. Salah satu pendapat terkenal Ibn Taimiyah adalah bahwa "lebih baik diperintah oleh pemimpin kafir yang adil daripada oleh pemimpin muslim yang zalim." (Anwar Sanusi, 2017)

Adil tidak hanya berlaku terhadap manusia, tetapi juga harus diterapkan terhadap Allah. Keadilan terhadap Allah tercermin dalam bertauhid. Menurut Ibn Taimiyah, seseorang yang hanya adil terhadap manusia tetapi tidak terhadap Allah belum mencapai keadilan yang utuh. Oleh karena itu, Ibn Taimiyah menganggap tauhid sebagai dasar atau inti dari keadilan. (Ash-Shufi, Mulyana and Fadhlil, 2021)

3. Penerapan syariah dalam politik

Kepemimpinan berdasarkan syari'ah menurut Ibn Taimiyah adalah konsep politik yang dia tawarkan sebagai solusi atas situasi politik yang dihadapinya. (Suharti, 2015) Konsep ini menegaskan bahwa setiap aspek kepemimpinan harus selalu didasarkan pada Al-Qur'an dan Hadis sebagai sumber utama hukum dan petunjuk dalam Islam. Ibn Taimiyah menekankan bahwa pemimpin yang ideal adalah mereka yang mampu mengelola pemerintahan berdasarkan prinsip-prinsip syari'ah, menegakkan keadilan, menjaga kesejahteraan rakyat, serta menghindari segala bentuk korupsi dan ketidakadilan. Pemimpin juga harus memahami dan menerapkan nilai-nilai Al-Qur'an dan Hadis dalam setiap keputusan dan tindakan mereka.

4. Penegakan Hukum – Hukum dan Hak Allah

Ibnu Taimiyah menekankan bahwa penegakan hukum adalah fondasi kehidupan yang teratur dan adil. Ia menegaskan bahwa penerapan hukum hudud (hukuman yang ditentukan untuk pelanggaran spesifik dalam syariah), hukum kehidupan (aturan-aturan yang mengatur interaksi sosial dan kehidupan sehari-hari), serta hukum jihad (aturan yang mengatur pertahanan dan perjuangan dalam Islam) sangat penting. (M. Abdurrahman, 2003) Penegakan hukum-hukum ini bertujuan untuk menjaga keamanan dan kestabilan masyarakat, memastikan keadilan, serta memelihara tatanan sosial yang harmonis. Menurutnya, hanya dengan tegaknya hukum, masyarakat dapat hidup dalam kedamaian dan kesejahteraan, serta terlindungi dari kekacauan dan ketidakadilan.

5. Dakwah dan Edukasi Politik

Menurut Ibnu Taimiyah, dakwah politik memiliki peran penting dalam memengaruhi penyelenggaraan keadilan dan kebaikan dalam masyarakat. Baginya, dakwah politik tidak hanya tentang menyebarkan nilai-nilai agama, tetapi juga menekankan pentingnya pemerintah dan pemimpin untuk bertindak sesuai dengan prinsip-prinsip Islam dalam mengatur kehidupan umat. Ibnu Taimiyah melihat dakwah politik sebagai panggilan bagi umat Islam untuk tidak hanya menjadi individu yang saleh secara personal, tetapi juga berperan aktif dalam politik untuk menciptakan perubahan yang lebih luas dalam masyarakat. Politik, menurutnya, memiliki dampak besar dalam berbagai aspek kehidupan sosial, ekonomi, dan keadilan. (Iwan Swasan, 2018)

Jadi, menurut Ibnu Taimiyah, dakwah politik bukan hanya sekadar tentang mengambil kendali politik, tetapi lebih pada tanggung jawab umat Islam untuk memastikan bahwa nilai-nilai mereka tercermin dalam seluruh aspek kehidupan masyarakat.

III. Penutup

Etika politik di Indonesia telah banyak menyimpang dari ajaran Ibnu Taimiyah. Untuk mengatasi masalah ini, strategi yang diusulkan oleh Ibnu Taimiyah tetap relevan untuk diterapkan. Strategi tersebut meliputi penegakan prinsip tauhid dan keadilan,

ISSN:

penerapan syariah dalam politik, penegakan hukum-hukum dan Hak Allah, dakwah serta edukasi politik, dan peran aktif masyarakat serta pemimpin. Dengan menerapkan strategi-strategi ini, diharapkan dapat mengembalikan etika politik di Indonesia sesuai dengan ajaran Islam yang sebenarnya, serta meningkatkan kualitas kepemimpinan dan kehidupan politik di negara ini.

DAFTAR PUSTAKA

- A. Muslimin. (2020). *Pemikiran Politik Hukum Ibnu Taimiyah Dalam Kitab* (p. 178). p. 178.
- Aly, S. (2015). Kedudukan Agama dan Negara: Perspektif Pemikir Muslim Abad Pertengahan Ibn Taymiyyah Pendahuluan Pemikiran politik Islam dalam bentuk karya akademik menurut para ahli baru muncul Meskipun (syumul) meliputi berbagai aspek kehidupan , Para pemikir politi. *Ilmu Ushuluddin*, 2(3), 255–276.
- Anggara, S. (2015). 11. Buku Sistem Politik Indonesia.pdf. *Sistem Politik Indonesia*, pp. 22–24.
- Anton Afrizal, C. (2017). Pemikiran Siyasah Syar'iyah Ibnu Taimiyah (Kajian Terhadap Konsep Imamah Dan Khilafah Dalam Sistem Pemerintahan Islam). *UIR Law Review*, 1(02), 161–172.
- Anwar Sanusi. (2017). Pemikiran Politik Islam. In *Universitas Nusantara PGRI Kediri* (Vol. 01, pp. 1–7).
- Arif, M., Junaidi, S., Basri, H., & NEGARA DAN KEPEMIMPINAN Matroni, K. (2022). PEMIKIRAN POLITIK ISLAM IBNU TAIMIYAH DAN GUS DUR: KONSEP NEGARA DAN KEPEMIMPINAN. *Jurnal Keislaman Dan Kemasyarakatan*, 6(2), 387–413.
- Ash-Shufi, C. G. F., Mulyana, A., & Fadhilil, F. D. (2021). Konsep Pemimpin Adil Ibnu Taimiyah Dan Relevansinya Dengan Demokrasi Indonesia. *Jurnal Tapis: Jurnal Teropong Aspirasi Politik Islam*, 17(1), 52–68. <https://doi.org/10.24042/tps.v17i1.8601>
- Aspinall, E., & Sukmajati, M. (2015). Patronase dan Klientelisme pada Pemilu Legislatif 2014. In *Politik Uang di Indonesia : Patronase dan Klientelisme pada Pemilu Legislatif 2014*.
- Azizah, Q. (2021). Konsep Tauhid Ibnu Taimiyah dan Pengaruhnya Terhadap Pembaharuan Pemikiran Islam. *Aqlania: Jurnal Filsafat Dan Teologi Islam*, 12(2), 181–198.
- Dahlan, D. (2021). Etika Politik Dalam Islam (Konstruksi Dan Perspektif). *Menara Ilmu*, 15(1), 42–50. <https://doi.org/10.31869/mi.v15i1.2389>
- Farhah, A. F. (2019). PRINSIP ETIKA POLITIK PEMIMPIN DALAM ISLAM. *Dauliyah*, 4(2), 66–84.
- I Putu Sastra Wingarta, Berlian Helmy, Dwi Hartono, I Wayan Mertadana, & Reda Wicaksono. (2021). Pengaruh Politik Identitas terhadap Demokrasi di Indonesia. *Jurnal Lemhannas RI*, 9(4), 117–124. <https://doi.org/10.55960/jlri.v9i4.419>
- IN'AMUZZAHIDIN, M. (2016). Etika Politik Dalam Islam. *Wahana Akademika: Jurnal Studi Islam Dan Sosial*, 2(2), 89. <https://doi.org/10.21580/wa.v2i2.382>

- Iwan Swasan, dkk. (2018). PEMIKIRAN POLITIK ISLAM (Studi Analisis Pemikiran Ibnu Taimiyah Mengenai Hakikat Negara). *Politica: Jurnal Hukum Tata Negara Dan Politik Islam*, 4(II), 20–42. <https://doi.org/10.32505/politica.v4iii.363>
- Jordan. (2013). Biografi Ibnu Taimiyyah. *Journal of Chemical Information and Modeling*, 53(9), 16–37.
- Kasman Bakry, Abdul Haris Abbas, Ashar, & Abdullah Nazhim Hamid. (2021). Konsep Kepemimpinan Negara Islam (Studi Komparasi Pemikiran al-Mawardi dan Ibnu Taimiyah). *NUKHBATUL 'ULUM: Jurnal Bidang Kajian Islam*, 7(1), 1–19. <https://doi.org/10.36701/nukhbah.v7i1.201>
- Kurniati. (2013). Perkembangan Sosial Politik Dalam Tatanan Pembentukan Hukum Islam. *Al-Fikr*, 17(1), 176–189.
- M. Abdurrahman. (2003). PEMIKIRAN POLITIK IBN TAIMIYAH. *Mimbar*, XIX(2), 152–158.
- M. Thahir Maloko. (2013). Etika Politik Dalam Islam. *Al-Daulah*, 1(2), 850–859. <https://doi.org/10.21580/wa.v2i2.382>
- Mahmuddin. (2015). Pemikiran Politik Ibnu Tamiyah. *Jurnal Tahdis*, 6(2), 63–72.
- Melyani, M. (2020). Pemahaman Hadis Kepemimpinan Quraish: Studi Komparasi Ibnu Taimiyyah dan Ibnu Khaldūn. *Diroyah: Jurnal Studi Ilmu Hadis*, 5(1), 45–57. <https://doi.org/10.15575/diroyah.v5i1.8986>
- Nurhakim, A. (2017). Negara Hukum Perspektif Ibnu Taimiyah. *AL Mashlahah: Jurnal Hukum Dan Pranata Sosial Islam*, 5, 112.
- Stocks, N. (2016). *Profil Ibnu Taimiyyah*. 1–23.
- Suharti. (2015). Siyasah Syar'iyah Ibnu Taimiyah (Politik Islam Ibnu Taimiyah). *Jurnal Pemikiran Dan Hukum Islam*, 2(2), 24–43.
- Syaputra, D. S. P. I. T. dalam K. O. : D. (2011). *ETIKA POLITIK (Studi Pemikiran Ibnu Taimiyah dalam Kitab al-Siyâsah al-Syar'îyyah fî Ishlâh al-Râ'î wa al-Ra'îyyah)* (pp. 1–49). pp. 1–49.